



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029
KECAMATAN BEKASI BARAT
KOTA BEKASI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas izinnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Stakholder di Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Renstra ini menjadi pedoman Kecamatan Bekasi Barat dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari, dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dokumen Renstra ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan serta kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

Bekasi, 2025
CAMAT BEKASI BARAT

RIDWAN AS, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691030 200312 1 005

[i]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum2

 1.3 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat dengan
 Dokumen Lainnya5

 1.4 Maksud dan Tujuan 10

 1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI BARAT 15

 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat 15

 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Barat.....29

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah47

 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah51

 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah55

 2.6 Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat61

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN
BEKASI BARAT68

 3.1 Tujuan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-202969

 3.2 Sasaran Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-202970

 3.3 Strategi Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029.....73

 3.4 Arah Kebijakan Pada Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-202974

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN 79

 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan79

 4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
 Pembangunan Daerah 105

 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
 Kecamatan Bekasi Barat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 112

 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 112

BAB V PENUTUP 114

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin 30

Tabel 2. 2 Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Pendidikan 30

Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Golongan 31

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2019-2020 31

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2021-2024 37

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021-2023 48

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024-2026 48

Tabel 2. 8 Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat 49

Tabel 2. 9 Jumlah RW dan RT pada Kecamatan Bekasi Barat 51

Tabel 2. 10 Jumlah Posyandu, LPM dan BKM pada Kecamatan Bekasi Barat 51

Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat..... 59

Tabel 2. 12 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat 67

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Barat 72

Tabel 3. 2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Bekasi Barat 2025-2029 74

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Kecamatan Bekasi Barat 74

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bekasi Barat 77

Tabel 4. 1 Cascading Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....

Tabel 4. 2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Kecamatan Bekasi Barat dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bekasi Barat.....

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 6

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan
RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja 8

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat.....

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat.....

Gambar 3. 1 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Gambar 3. 2 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....

Gambar 3. 3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra PD.....

**GAMBAR 4. 1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA KECAMATAN
BEKASI BARAT 81**

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB I
PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Barat untuk mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka menjadikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 lebih rasional, efektif dan akuntabel, dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bekasi Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat;

[1]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar

[2]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan

[3]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

[4]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat dengan Dokumen Lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Rencana Strategis(Renstra) K/L dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Bekasi Barat, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

[5]

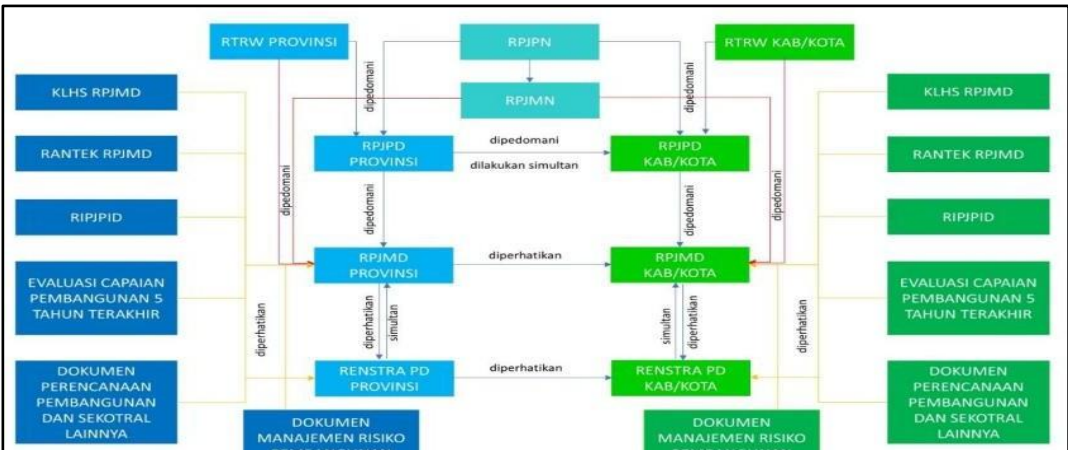
Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kecamatan Bekasi Barat untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Rencana Strategis dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Kecamatan Bekasi Barat merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat dapat berjalan dengan baik.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.3.1 Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra Kecamatan

[6]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Bekasi Barat adalah bahwa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Rencana Strategis K/L

Renstra K/L memuat pokok pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Bekasi Barat akan selalu bersinergi antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Rencana Strategis K/L.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2026 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat. Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis tiga

[7]

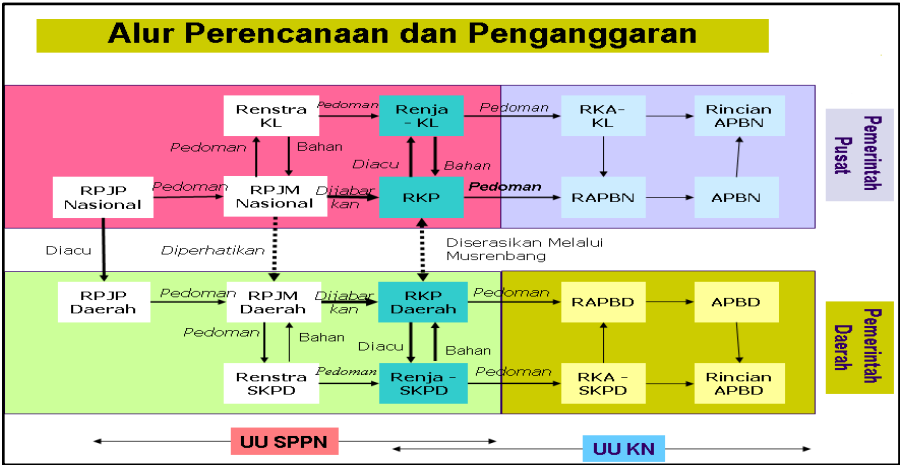
Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.3.3 Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Kecamatan

Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Bekasi Barat akan selalu bersinergi antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.3.4 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

[8]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2026 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
6. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat;
7. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

[9]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tahunan (Renja) Kecamatan Bekasi Barat.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun yg mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis, agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergitas antara Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat;
- 2. Mengoperasionalkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3. Menjamin keselarasan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- 4. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat.
- 5. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- 6. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

[10]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



7. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yg telah direncanakan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat hingga tahun 2030;
8. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2. Landasan Hukum, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan PD.
- 1.3. Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;
- 1.5. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT

- 2.1 Gambaran bagi Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

[11]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



memuat struktur organisasi PD dan tugas, fungsi PD, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana PD.

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, asset/modal, fasilitas PD lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra PD sebelumnya.dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.
- 2.4 Kelompok Sasaran layanan, menguraikan siapa saja penerima manfaat pelayanan PD
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan

[12]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- elayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD.
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.
- 3.4 3 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktorfaktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isuisu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Bekasi Barat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025–2029.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Kecamatan Bekasi Barat, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan-pelayanan ini mencakup bidang administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum, pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Mendorong pembangunan di berbagai bidang.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 2 (dua) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

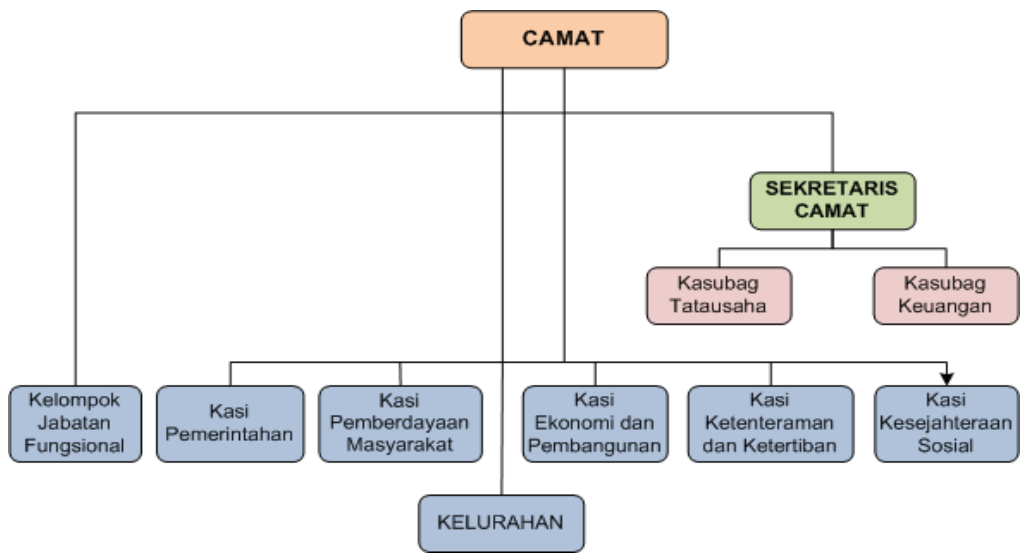


Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdiri dari :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, diolah

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Camat.

Tugas dan fungsi Camat :

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

[17]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
 12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
2. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
4. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
5. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
6. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
7. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
8. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Seksi;

9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
10. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat membawahkan :

Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
3. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
4. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
5. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
6. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
7. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
8. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
9. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
10. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
11. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

[19]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
3. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
4. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
5. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
6. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan

[20]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



umum di Kecamatan;

5. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
6. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
7. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
8. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
9. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
12. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
4. pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
5. pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
6. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

[21]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
8. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 9. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
 10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 12. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
4. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
6. pembinaan dan pengoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
9. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

[22]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tugas dan Fungsi :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
4. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
5. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
8. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas dan Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

[23]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
5. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
8. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat yaitu Kelurahan Bojong Bekasi Barat, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Sepanjangjaya dan Kelurahan Pengasinan. Berikut Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdiri dari:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Lurah.

Tugas dan fungsi Lurah :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang

[24]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan social, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
3. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
8. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
9. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
10. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
12. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
13. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Lurah :

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai

[25]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
2. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
4. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
5. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
6. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
7. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
8. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
10. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
4. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

[26]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
5. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
 6. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
 7. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
 8. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
 9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
 10. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
2. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
3. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
4. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
5. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
6. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
7. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan operasi masyarakat Kelurahan;

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- 8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- 9. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- 1. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- 3. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- 4. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- 5. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- 6. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- 7. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

2.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia di Kecamatan Bekasi Barat

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang umumnya tersedia di Kecamatan Bekasi Barat:

- 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan: Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
- 2. Pelayanan Perizinan: Pengurusan izin usaha, dan izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- 3. Pelayanan Sosial: Pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



sekolah, serta pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas.

4. Pelayanan Infrastruktur: Pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum.
5. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban: Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
6. Pelayanan Ekonomi: Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di dukung oleh 207 orang pegawai. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai apabila dilihat dari komposisi antara Pelaksana dan Pemangku Jabatan secara berjenjang belum proposional. Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Barat yang mempunyai 5 (lima) Kelurahan didukung oleh sebanyak 210 orang pegawai, terdiri dari 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 128 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 27 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Dimana dilihat dari tabel 2.1 dapat dilihat Jumlah Laki laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan di Kecamatan Bekasi Barat.

[29]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	55	38	17
2	PPPK	128	63	65
3	Tenaga Kontrak	27	10	17
	Total	210	111	99

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Juli Tahun 2025

Dengan adanya Klasifikasi pendidikan membantu pemerintah daerah menempatkan pegawai sesuai kompetensi akademik dan bidang keilmuannya. Dilihat dari tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa secara umum, tingkat pendidikan pegawai sudah relatif baik. Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berasal dari status PPPK, yaitu sekitar 61% dari total pegawai. Sementara itu, PNS hanya mencakup 26% dan tenaga kontrak 13%.

Tabel 2. 2 Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	55	-	11	33	1	10	-	-
2	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	128	-	-	42	11	74	1	-
3	TENAGA KONTRAK	27	-	-	9	-	18	-	-
	TOTAL	210		11	84	12	102	1	

Sumber data : daSumber : Daftar urut kepangkatan PNS, PPPK dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025

Bedasarkan Tabel 2.3, terdapat sebanyak 46 orang pegawai atau sekitar 83,6% dari total PNS termasuk dalam Golongan III. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di level menengah, di mana diisi oleh pejabat struktural dan pelaksana. Selain itu ada 6 orang pegawai di Golongan II atau sekitat 10,9%, yang sebagian besar adalah staf pelaksana dengan pendidikan menengah atau diploma. Sementara itu, hanya ada tiga pegawai di Golongan IV atau sekitar 5,5%.

[30]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55	3	46	6	-
JUMLAH		55	3	46	6	

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan sumber daya keuangan untuk OPD. Kecenderungan anggaran telah berubah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun terakhir. Adapun Realisasi Keuangan dalam 5 Tahun terakhir merupakan gambaran penggunaan anggaran OPD selama periode perencanaan sebelumnya. Dimana data yang disajikan dalam dua format sesuai dengan dasar hukum yang diacu. Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2019-2020

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,682,950,000.00	8,690,100,000.00	8,376,858,168.00	8,638,036,486.00	0.965	0.994
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,000,000.00	531,980,000.00	229,772,913.00	510,732,321.00	0.999	0.960
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,000,000.00	144,000,000.00	99,965,000.00	143,985,000.00	1.000	1.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	108,000,000.00	110,000,000.00	105,911,430.00	107,979,600.00	0.981	0.982

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96,000,000.00	100,000,000.00	94,860,100.00	99,092,700.00	0.988	0.991
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	9,948,000.00	0.250	0.995
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,200,000.00	3,000,000.00	7,600,000.00	2,000,000.00	0.302	0.667
Penyediaan Makanan dan Minuman	40,000,000.00	0	20,000,000.00	0	0.500	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50,000,000.00	0	0	0	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	7,863,750,000.00	7,776,900,000.00	7,743,704,725.00	7,750,078,865.00	0.985	0.997
Penyediaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50,000,000.00	14,220,000.00	40,500,000.00	14,220,000.00	0.810	1.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100,000,000.00	0	29,544,000.00	0	0.295	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	445,000,000.00	95,800,000.00	149,525,800.00	54,860,600.00	0.336	0.573
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200,000,000.00	0	59,350,000.00	0	0.297	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	200,000,000.00	73,300,000.00	61,205,800.00	32,395,600.00	0.306	0.442
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45,000,000.00	22,500,000.00	28,970,000.00	22,465,000.00	0.644	0.998
Program Peningkatan	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	0	0		-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000.00	0	0		-	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	237,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.032	-
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Barat	150,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		0.050	-
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Barat	87,500,000.00	0	0		-	-
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen Penyelenggaraan	12,016,955,000.00	2,431,556,800.00	11,331,114,500.00	2,156,854,983.00	0.943	0.887
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	30,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Barat	198,000,000.00	1,296,000.00	20,000,000.00	761,400.00	0.101	0.588

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat	133,000,000.00	120,000,000.00	62,150,000.00	78,103,200.00	0.467	0.651
Penyelenggaraan Kegiatan RT RW di Kecamatan Bekasi Barat	50,000,000.00		0		-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di kecamatan Bekasi Barat	235,000,000.00		35,250,000.00		0.150	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintara Jaya	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Bintara Jaya	722,000,000.00	44,712,000.00	693,200,000.00	26,200,583.00	0.960	0.586
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Bintara Jaya	866,250,000.00	51,710,400.00	866,250,000.00	30,530,844.00	1.000	0.590
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bintara Jaya	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0	1.000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bintara Jaya	352,941,000.00	350,000,000.00	352,941,000.00	350,000,000.00	1.000	1.000
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kranji	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Kranji	690,000,000.00	43,934,400.00	682,000,000.00	25,126,200.00	0.988	0.572
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Kranji	758,750,000.00	44,712,000.00	758,750,000.00	28,975,104.00	1.000	0.648
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Kranji	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0	1.000	-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kranji	352,941,000.00	350,000,000.00	352,941,000.00	350,000,000.00	1.000	1.000
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kotabaru	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Kotabaru	782,000,000.00	50,673,600.00	782,000,000.00	29,770,740.00	1.000	0.588
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Kotabaru	1,311,250,000.00	78,148,800.00	1,311,250,000.00	43,050,096.00	1.000	0.551
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Kotabaru	67,500,000.00	0	67,500,000.00	0	1.000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kotabaru	352,941,000.00	350,000,000.00	352,941,000.00	350,000,000.00	1.000	1.000
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jakasampurna	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jakasampurna	874,000,000.00	56,764,800.00	874,000,000.00	33,281,820.00	1.000	0.586
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jakasampurna	1,401,250,000.00	83,592,000.00	1,401,250,000.00	49,034,160.00	1.000	0.587
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jakasampurna	92,500,000.00	0	92,500,000.00	0	1.000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jakasampurna	352,941,000.00	350,000,000.00	352,941,000.00	350,000,000.00	1.000	1.000
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintara	20,000,000.00	0	0	0	-	-
Penguatan Kapasitas Kader	642,000,000.00	40,305,600.00	624,800,000.00	23,646,600.00	0.973	0.587

[35]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Posyandu dan PKK di Kelurahan Bintara						
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Bintara	1,096,250,000.00	65,707,200.00	1,096,250,000.00	38,374,236.00	1.000	0.584
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bintara	82,500,000.00	0	82,500,000.00	0	1.000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bintara	352,941,000.00	350,000,000.00	349,700,500.00	350,000,000.00	0.991	1.000

Realisasi Anggaran pada Tahun 2021-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Bekasi Barat	29,100,202,200	30,506,636,429	32,444,951,190	35,770,436,000	25,920,126,613	28,582,668,701	30,849,214,551	34,181,662,703	0.891	0.937	0.951	0.956
	Kecamatan	22,194,480,500	23,518,942,029	22,520,788,590	23,774,111,600	20,113,506,001	22,019,886,016	21,073,460,485	22,291,285,228	0.906	0.936	0.936	0.938
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,555,384,000	22,829,151,029	21,777,632,590	22,853,568,600	19,886,251,001	21,411,517,636	20,363,735,887	21,461,465,028	0.923	0.938	0.935	0.939
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,540,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	5,100,000	3,000,000	10,000,000	0.000	0.510	1.000	1.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,540,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	5,100,000	3,000,000	10,000,000	0.000	0.510	1.000	1.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,798,708,000	12,003,292,000	11,911,494,000	12,112,762,000	11,205,956,257	11,364,916,536	10,870,480,038	11,469,390,297	0.950	0.947	0.913	0.947
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,788,784,000	11,993,292,000	11,908,494,000	12,102,762,000	11,205,956,257	11,357,994,336	10,867,480,038	11,460,790,297	0.951	0.947	0.913	0.947
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,924,000	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	6,922,200	3,000,000	8,600,000	0.000	0.692	1.000	0.860
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,000,000	-	10,000,000	10,000,000	89,000,000	-	10,000,000	-	0.989	0.000	1.000	0.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90,000,000	-	-	-	89,000,000	-	-	-	0.989	0.000	0.000	0.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	0.000	0.000	1.000	0.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384,000,000	450,000,000	460,000,000	519,507,000	325,223,800	387,232,800	436,362,000	500,993,200	0.847	0.861	0.949	0.964

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	25,000,000	20,000,000	20,000,000	19,880,300	25,000,000	20,000,000	17,603,400	0.994	1.000	1.000	0.880
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	161,190,000	227,982,000	233,876,000	236,612,800	0.948	0.950	0.974	0.986
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120,000,000	105,000,000	60,000,000	50,000,000	117,353,500	85,512,800	59,000,000	49,895,000	0.978	0.814	0.983	0.998
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	21,600,000	29,700,000	10,950,000	14,250,000	0.864	0.743	0.548	0.713
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,000,000	20,000,000	115,000,000	135,000,000	5,200,000	-	107,640,000	129,812,000	0.106	0.000	0.936	0.962
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	20,000,000	5,000,000	54,507,000	-	19,038,000	4,896,000	52,820,000	0.000	0.952	0.979	0.969
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100,000,000	-	495,956,000	-	96,792,000	-	488,141,000	0.000	0.968	0.000	0.984
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	-	100,000,000	-	495,956,000	-	96,792,000	-	488,141,000	0.000	0.968	0.000	0.984
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,828,136,000	9,665,859,029	9,038,138,590	8,915,343,600	7,968,652,494	9,072,599,562	8,721,113,782	8,357,738,768	0.903	0.939	0.965	0.937
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300,000,000	404,600,000	404,600,000	644,600,000	283,536,574	293,812,190	308,361,435	442,923,091	0.945	0.726	0.762	0.687
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,528,136,000	9,261,259,029	8,633,538,590	8,270,743,600	7,685,115,920	8,778,787,372	8,412,752,347	7,914,815,677	0.901	0.948	0.974	0.957
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445,000,000	600,000,000	355,000,000	790,000,000	297,418,450	484,876,738	322,780,067	635,201,763	0.668	0.808	0.909	0.804

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,000,000	50,000,000	35,000,000	80,000,000	54,324,494	42,629,429	34,870,600	64,601,363	0.272	0.853	0.996	0.808
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	56,859,209	119,073,167	119,765,700	####	0.379	0.794	0.798
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000	150,000,000	20,000,000	110,000,000	44,310,000	138,250,000	19,540,000	104,825,000	0.985	0.922	0.977	0.953
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	250,000,000	150,000,000	450,000,000	198,783,956	247,138,100	149,296,300	346,009,700	0.994	0.989	0.995	0.769
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	85,540,500	120,000,000	80,000,000	135,810,000	74,160,000	110,229,500	61,791,000	119,309,500	0.867	0.919	0.772	0.879
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,090,500	20,000,000	30,000,000	50,000,000	24,360,000	19,000,000	30,000,000	44,649,500	0.971	0.950	1.000	0.893
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,090,500	20,000,000	30,000,000	50,000,000	24,360,000	19,000,000	30,000,000	44,649,500	0.971	0.950	1.000	0.893
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60,450,000	100,000,000	50,000,000	85,810,000	49,800,000	91,229,500	31,791,000	74,660,000	0.824	0.912	0.636	0.870

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	60,450,000	100,000,000	50,000,000	85,810,000	49,800,000	91,229,500	31,791,000	74,660,000	0.824	0.912	0.636	0.870
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	466,056,000	444,481,000	573,156,000	330,000,000	153,095,000	422,169,380	558,033,598	296,885,700	0.328	0.950	0.974	0.900
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	466,056,000	444,481,000	573,156,000	330,000,000	153,095,000	422,169,380	558,033,598	296,885,700	0.328	0.950	0.974	0.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120,000,000	98,425,000	120,000,000	120,000,000	44,784,000	96,187,000	118,220,000	115,751,500	0.373	0.977	0.985	0.965
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	296,056,000	296,056,000	403,156,000	160,000,000	95,291,000	279,571,000	390,933,598	156,384,200	0.322	0.944	0.970	0.977
	Evaluasi Kelurahan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	13,020,000	46,411,380	48,880,000	24,750,000	0.260	0.928	0.978	0.495
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-	32,750,000	40,000,000	38,936,000	0.000	0.655	1.000	0.973
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-	32,750,000	40,000,000	38,936,000	0.000	0.655	1.000	0.973
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	50,000,000	40,000,000	40,000,000	-	32,750,000	40,000,000	38,936,000	0.000	0.655	1.000	0.973
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	87,500,000	75,310,000	50,000,000	414,733,000	-	43,219,500	49,900,000	374,689,000	0.000	0.574	0.998	0.903

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87,500,000	75,310,000	50,000,000	414,733,000	-	43,219,500	49,900,000	374,689,000	0.000	0.574	0.998	0.903
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87,500,000	75,310,000	50,000,000	100,000,000	-	43,219,500	49,900,000	68,790,000	0.000	0.574	0.998	0.688
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	314,733,000	-	-	-	305,899,000	0.000	0.000	0.000	0.972
	Kelurahan Bintara	1,370,212,800	1,385,212,800	2,007,816,200	2,425,751,800	1,143,460,288	1,303,054,798	1,984,957,998	2,412,324,800	0.835	0.941	0.989	0.994
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	19,496,000	18,972,000	18,499,000	0.000	0.975	0.949	0.925
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	19,496,000	18,972,000	18,499,000	0.000	0.975	0.949	0.925
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	19,496,000	18,972,000	18,499,000	0.000	0.975	0.949	0.925
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,345,212,800	1,365,212,800	1,987,816,200	2,171,751,800	1,143,460,288	1,283,558,798	1,965,985,998	2,161,013,800	0.850	0.940	0.989	0.995

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,345,212,800	1,345,212,800	1,917,816,200	2,131,751,800	1,143,460,288	1,263,558,798	1,896,355,998	2,121,013,800	0.850	0.939	0.989	0.995
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,345,212,800	1,345,212,800	1,717,816,200	1,931,751,800	1,143,460,288	1,263,558,798	1,696,355,998	1,921,013,800	0.850	0.939	0.988	0.994
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	69,630,000	40,000,000	0.000	1.000	0.995	1.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	69,630,000	40,000,000	0.000	1.000	0.995	1.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	234,000,000	-	-	-	232,812,000	0.000	0.000	0.000	0.995
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	234,000,000	-	-	-	232,812,000	0.000	0.000	0.000	0.995
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	234,000,000	-	-	-	232,812,000	0.000	0.000	0.000	0.995
	Kelurahan Bintarajaya	1,155,518,200	1,183,642,400	1,710,782,400	2,084,436,000	916,302,480	1,108,888,599	1,699,023,997	2,040,163,825	0.793	0.937	0.993	0.979
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,325,000	19,730,000	20,880,000	0.000	0.966	0.987	0.522
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,325,000	19,730,000	20,880,000	0.000	0.966	0.987	0.522

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,325,000	19,730,000	20,880,000	0.000	0.966	0.987	0.522
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,130,518,200	1,163,642,400	1,690,782,400	1,874,436,000	916,302,480	1,089,563,599	1,679,293,997	1,862,383,825	0.811	0.936	0.993	0.994
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,130,518,200	1,143,642,400	1,620,782,400	1,834,436,000	916,302,480	1,069,563,599	1,611,093,997	1,822,383,825	0.811	0.935	0.994	0.993
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,130,518,200	1,143,642,400	1,420,782,400	1,634,436,000	916,302,480	1,069,563,599	1,411,093,997	1,622,383,825	0.811	0.935	0.993	0.993
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	68,200,000	40,000,000	0.000	1.000	0.974	1.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	68,200,000	40,000,000	0.000	1.000	0.974	1.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	170,000,000	-	-	-	156,900,000	0.000	0.000	0.000	0.923
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	170,000,000	-	-	-	156,900,000	0.000	0.000	0.000	0.923
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	170,000,000	-	-	-	156,900,000	0.000	0.000	0.000	0.923

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Kelurahan Kranji	1,017,328,000	1,063,056,000	1,579,424,000	1,939,134,000	855,143,222	977,486,599	1,556,173,896	1,931,710,150	0.841	0.920	0.985	0.996
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000	-	19,121,000	18,643,500	43,728,550	0.000	0.956	0.932	0.972
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000	-	19,121,000	18,643,500	43,728,550	0.000	0.956	0.932	0.972
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000	-	19,121,000	18,643,500	43,728,550	0.000	0.956	0.932	0.972
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	992,328,000	1,043,056,000	1,559,424,000	1,744,134,000	855,143,222	958,365,599	1,537,530,396	1,737,981,600	0.862	0.919	0.986	0.996
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	992,328,000	1,023,056,000	1,489,424,000	1,704,134,000	855,143,222	938,365,599	1,467,530,396	1,697,981,600	0.862	0.917	0.985	0.996
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	992,328,000	1,023,056,000	1,289,424,000	1,504,134,000	855,143,222	938,365,599	1,267,530,396	1,497,981,600	0.862	0.917	0.983	0.996
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	0.000	1.000	1.000	1.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	0.000	1.000	1.000	1.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.000	0.000	0.000	1.000

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.000	0.000	0.000	1.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.000	0.000	0.000	1.000
	Kelurahan Kotabaru	1,604,043,800	1,586,022,400	2,213,404,400	2,607,026,400	1,408,940,624	1,517,013,690	2,170,503,778	2,581,408,900	0.878	0.956	0.981	0.990
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,453,000	19,600,000	37,024,000	0.000	0.973	0.980	0.926
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,453,000	19,600,000	37,024,000	0.000	0.973	0.980	0.926
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	-	19,453,000	19,600,000	37,024,000	0.000	0.973	0.980	0.926
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,579,043,800	1,566,022,400	2,193,404,400	2,373,526,400	1,408,940,624	1,497,560,690	2,150,903,778	2,351,465,400	0.892	0.956	0.981	0.991
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,579,043,800	1,546,022,400	2,123,404,400	2,333,526,400	1,408,940,624	1,477,560,690	2,084,503,778	2,311,465,400	0.892	0.956	0.982	0.991
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,579,043,800	1,546,022,400	1,923,404,400	2,133,526,400	1,408,940,624	1,477,560,690	1,884,503,778	2,111,465,400	0.892	0.956	0.980	0.990

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	66,400,000	40,000,000	0.000	1.000	0.949	1.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	66,400,000	40,000,000	0.000	1.000	0.949	1.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	193,500,000	-	-	-	192,919,500	0.000	0.000	0.000	0.997
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	193,500,000	-	-	-	192,919,500	0.000	0.000	0.000	0.997
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				193,500,000				192,919,500	0.000	0.000	0.000	0.997
	Kelurahan Jakasampurna	1,758,618,900	1,769,760,800	2,412,735,600	2,939,976,200	1,482,773,998	1,656,338,999	2,365,094,397	2,924,769,800	0.843	0.936	0.980	0.995
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25,000,000	20,000,000	20,000,000	50,000,000	-	18,583,000	19,740,000	41,927,000	0.000	0.929	0.987	0.839
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	50,000,000	-	18,583,000	19,740,000	41,927,000	0.000	0.929	0.987	0.839
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,000,000	20,000,000	20,000,000	50,000,000	-	18,583,000	19,740,000	41,927,000	0.000	0.929	0.987	0.839
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,733,618,900	1,749,760,800	2,392,735,600	2,565,976,200	1,482,773,998	1,637,755,999	2,345,354,397	2,559,862,800	0.855	0.936	0.980	0.998

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,733,618,900	1,729,760,800	2,322,735,600	2,525,976,200	1,482,773,998	1,617,755,999	2,275,354,397	2,519,862,800	0.855	0.935	0.980	0.998
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,733,618,900	1,729,760,800	2,122,735,600	2,325,976,200	1,482,773,998	1,617,755,999	2,075,354,397	2,319,862,800	0.855	0.935	0.978	0.997
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	0.000	1.000	1.000	1.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	-	20,000,000	70,000,000	40,000,000	0.000	1.000	1.000	1.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	324,000,000	-	-	-	322,980,000	0.000	0.000	0.000	0.997
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	324,000,000	-	-	-	322,980,000	0.000	0.000	0.000	0.997
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	324,000,000	-	-	-	322,980,000	0.000	0.000	0.000	0.997

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kinerja Kecamatan Bekasi Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Bekasi Barat.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Barat tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Barat periode 2019 sampai dengengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	-	-	-	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	82	82,5	83	82.5	82.19	84.73	100.60%	99.93%	102.1%
3	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Bekasi Barat	-	-	-	60	60	60	60	60	60	100%	100%	100%
4	Persentase Wilayah Tertib K3	-	-	-	57	71	86	57	71	86	100%	100%	100%

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Bekasi Barat 2019-2024

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	82,5	82.5	83	85,02			101,30 %		

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	74	74.5	75	62,81			84.88 %		
3	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	57	71	86	81,39			142.79%		

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Bekasi Barat 2019-2024

Tabel 2. 8 Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	40	40	40	40	40	40	74	62.81	74.5	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk pencapaian target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat selama periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026 hanya pada capaian pada Tahun 2023 yang tidak dapat tercapai dikarenakan ada beberapa ketidalselarasan antar dokumen perencanaan yang antara lain terdapat perbedaan indikator pada Renstra dan Renja akan tetapi perbedaan yang terdapat pada renstra dan renja telah diperbaiki dengan melakukan reuiu renstra dan renja pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2025 capaian Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat dapat meningkat sebesar 103.32%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Bekasi Barat.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan pada Renstra OPD adalah individu atau kelompok yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan dari program, kegiatan, dan layanan yang dikelola oleh OPD. Penentuan kelompok sasaran dilakukan agar kebijakan, tujuan, dan strategi pembangunan daerah dapat efektif, tepat guna, serta berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 92 Rukun Warga dan 749 Rukun Tetangga yang tersebar di lima kelurahan pada Kecamatan Bekasi Barat. Jumlah RT/RW pada masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 9 Jumlah RW dan RT pada Kecamatan Bekasi Barat

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kelurahan Kranji	16	99
2	Kelurahan Kotabaru	22	179
3	Kelurahan Bintarajaya	14	119
4	Kelurahan Bintara	17	160
5	Kelurahan Jakasampurna	23	192
	Total	92	749

Sumber : Profil Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024

Kecamatan Bekasi Barat juga mempunyai 179 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di lima kelurahan pada Kecamatan Bekasi Barat. Selain itu di Kecamatan Bekasi Barat juga memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) masing masing 1 Lembaga per Kelurahan. Jumlah Posyandu, LPM dan BKM pada masing masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah Posyandu, LPM dam BKM pada Kecamatan Bekasi Barat

No	Kelurahan	Jumlah Posyandu	Jumlah BKM	Jumlah LPM
1	Kelurahan Kranji	32		
2	Kelurahan Kotabaru	34		
3	Kelurahan Bintarajaya	34		
4	Kelurahan Bintara	37		
5	Kelurahan Jakasampurna	42		
	Total	179		

Sumber : Profil Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat:

2.4.1 Berdasarkan Usia:

- 1. Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
- 2. Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
- 3. Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.
- 4. Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

2.4.2 Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

- 1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT), pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.
- 2. Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



sosial.

- 3. Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
- 4. Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

2.4.3 Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:

- 1. Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.
- 2. Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.4.4 Kelompok Khusus Lainnya:

- 1. Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.
- 2. Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).
- 3. Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin).

Kecamatan Bekasi Barat memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Bekasi di tingkat wilayah. Camat dan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran dan efektif.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Beberapa tantangan meliputi:

1. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi: Memastikan data kelompok sasaran yang valid dan terkini.
2. Sosialisasi Program yang Efektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai program pelayanan yang tersedia.
3. Aksesibilitas Pelayanan: Memastikan kemudahan akses fisik dan non-fisik terhadap layanan bagi seluruh kelompok sasaran.
4. Koordinasi Antar Sektor: Memperkuat sinergi antara berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan.
5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Kecamatan Bekasi Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai inovasi, penguatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan koordinasi.

2.4.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Bekasi Barat melakukan koordinasi teknis dan operasional dengan perangkat daerah terkait, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil):
Pelaksanaan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el melalui mobil layanan keliling atau pelayanan jemput bola serta Fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian dan Penguatan data kependudukan sebagai dasar validasi dalam pelayanan lainnya.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
Penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui loket pelayanan terpadu atau giat layanan keliling serta sosialisasi dan edukasi perpajakan daerah kepada masyarakat, khususnya dalam masa jatuh tempo pembayaran dan Sinkronisasi data objek pajak dengan data kependudukan untuk validasi dan pemutakhiran database.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Dinas Pendidikan (Disdik):

Koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta pendataan anak usia sekolah yang tidak/belum terdaftar sebagai peserta didik untuk intervensi program pendidikan dan ukungan terhadap program kejar paket dan pendidikan inklusif di wilayah kecamatan.

4. Dinas Kesehatan (Dinkes):

Pelaksanaan kegiatan Posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas serta penanganan kasus penyakit menular (DBD, TBC, dll) melalui pelaporan dan koordinasi lintas sektor dan Program penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala terhadap kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil).

5. Koordinasi dengan perangkat daerah ini dilakukan secara rutin melalui forum lintas sektor, rapat teknis, dan pelaporan berbasis aplikasi atau sistem informasi yang tersedia. Model kerja kolaboratif ini mendukung percepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas intervensi kebijakan di tingkat kecamatan.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

[55]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;
3. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
4. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Bekasi Barat. Menggunakan

[56]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan di Bekasi Barat. Keputusan Wali Kota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bekasi Barat;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Bekasi Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Bekasi Barat dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- 3) Belum optimalnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan- kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Bekasi Barat;
- 2) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bekasi Barat;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bekasi Barat sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling

[58]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
 - 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat;
 - 4) Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak kepada masyarakat;

Permasalahan yang terjadi pada Pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat, antara lain :

- 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Prosedur Kerja.
- 2. Kurangya Integritas dan Profesionalitas Aparatur Pelayanan sehingga masih adanya Keluhan Masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan.
- 3. Kurangnya Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih representative.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

- 1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
- 2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
- 3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
- 4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta admnistrasi lainnya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
		Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan.
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup
3	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan Bekasi Barat	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Belum Optimalnya dukungan Manajemen	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
4	Fasilitasi UMKM di Kecamatan Bekasi Barat	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum adanya wadah kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Barat

2.6 Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan terukur. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Barat sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Kecamatan Bekasi Barat menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya identifikasi dan perumusan isu-isu strategis secara tepat.

[61]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak luas dan berjangka panjang terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Bekasi Barat, beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya identifikasi isu strategis antara lain adalah: pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, kompleksitas kebutuhan layanan publik, perubahan pola hidup masyarakat urban, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pembahasan isu strategis ini, Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 diarahkan agar mampu memberikan solusi konkret dan terukur terhadap permasalahan yang bersifat krusial, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, pembangunan wilayah yang berkeadilan, dan kehidupan

masyarakat yang lebih sejahtera. Isu strategis yang dirumuskan tidak hanya mengacu pada evaluasi capaian program sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi secara keseluruhan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola

[62]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu; dan
- Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara

[63]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan peralatan komputer sebagai penunjang pelayanan publik.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan

[64]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/ kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

Penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui program bantuan langsung, tetapi perlu strategi pemberdayaan masyarakat agar masyarakat miskin mampu meningkatkan kapasitas, mengurangi ketergantungan, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi. Adanya pembinaan dan pelatihan pada Masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya memberikan peluang untuk membantu pemerintah dalam pengetasan kemiskinan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi

[65]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Bekasi Barat. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2. 12 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat

Permasalahan di Kecamatan Bekasi Barat	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat
		Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan Publik	Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				
Tingkat Kemiskinan dan Permasalahan Stunting	Terdapat warga miskin ekstrem dan masih adanya permasalahan stunting	-	Pegesaran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan ketimpangan	Daya Saing SDM

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

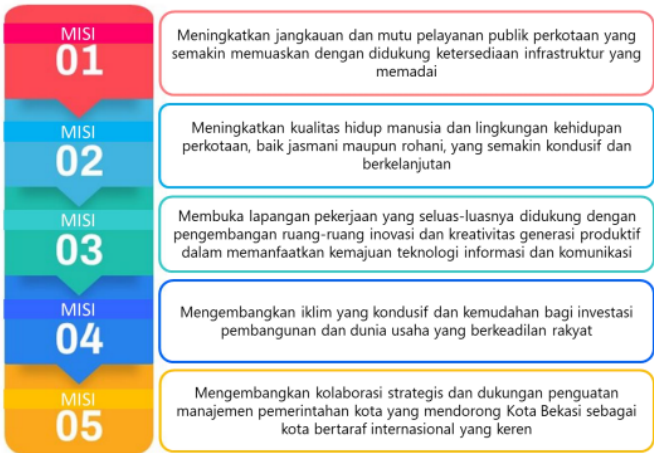


BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN BEKASI BARAT

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) menjadi dokumen yang sangat krusial. Renstra PD bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan peta jalan strategis yang menghubungkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, Visi dan misi yang terdapat didalamnya merupakan panduan untuk Kota Bekasi dalam pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan strategisnya. Visi mencerminkan keadaan sempurna yang ingin dicapai dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan misi berisi langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi itu.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen lanjutan RPJMD bertujuan untuk menjelaskan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap PD. Dengan demikian, setiap PD memiliki peran yang sejalan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dimana Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” dan Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai tertuang dalam Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

[68]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perencanaan strategis Kecamatan Bekasi Barat mengacu pada misi 1 dan misi 5 Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Adapun dari kedua misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

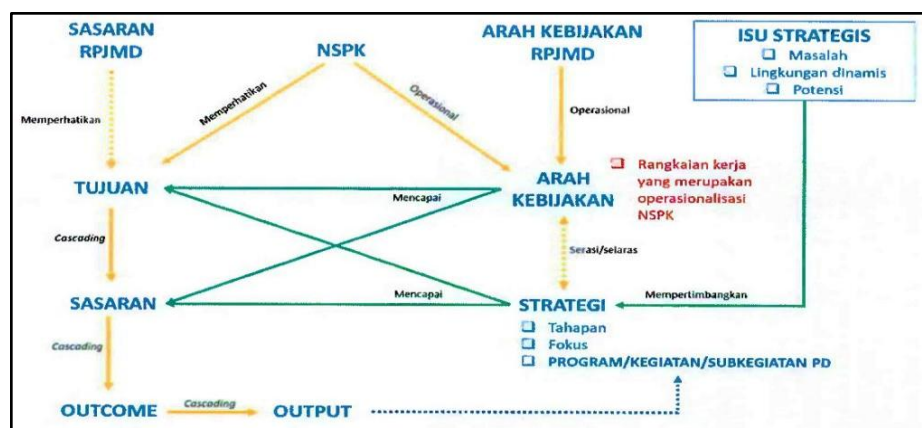
1. Misi 1 “Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai” memiliki Tujuan “Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari” dengan Sasaran “Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern”.
2. Misi 5 “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren” memiliki Tujuan “Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima”.

Dari tujuan dan sasaran pada Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka dapat menjadi acuan kecamatan untuk menyusun Tujuan Perangkat Daerah.

3.1 Tujuan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

Tujuan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Sehingga rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan pilihan-pilihan strategi kinerja serta merupakan sarana untuk mengevaluasi strategi-strategi tersebut. Selanjutnya untuk mencapai kondisi yang dirumuskan dalam tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja sebagai tahapan penting yang ditargetkan dicapai per tahun.

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun



Gambar 3. 2 Konsep Renstra Perangkat Daerah
2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Salah satu elemen penting dalam Renstra PD adalah penetapan tujuan jangka menengah PD, yang berfungsi sebagai jembatan antara visi-misi daerah dengan sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Tujuan jangka menengah ini memberikan arah strategis selama periode lima tahun kepemimpinan kepala daerah, sehingga seluruh program pembangunan dapat lebih fokus, terukur, dan konsisten dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah PD tidak dapat dipandang sekadar formalitas administrasi, melainkan merupakan representasi dari kontribusi nyata masing-masing PD terhadap pembangunan daerah. Tujuan jangka menengah PD merupakan rumusan mengenai kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ini bersifat strategis karena berhubungan langsung dengan pencapaian misi pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah PD dituangkan secara eksplisit dalam Renstra melalui struktur dokumen yang sistematis. Proses implementasinya dimulai dari analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Analisis internal mencakup kekuatan dan kelemahan PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan analisis eksternal meliputi peluang dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Dari analisis inilah kemudian dirumuskan tujuan jangka menengah yang sesuai dengan kapasitas PD sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah yang diusung dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat, yaitu “Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Barat”, merepresentasikan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung visi pembangunan Kota Bekasi secara keseluruhan. Rumusan tujuan merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif, analisis kebutuhan, serta penjabaran dari sasaran RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029.

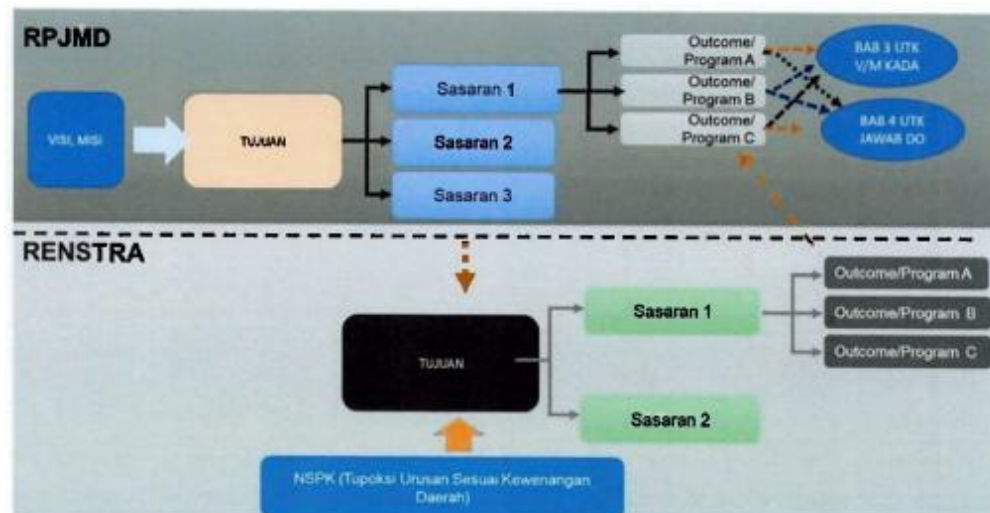
3.2 Sasaran Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

Salah satu elemen penting dalam penyusunan Renstra PD adalah penetapan sasaran yang terukur. Sasaran terukur berfungsi sebagai indikator keberhasilan yang dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Tanpa adanya sasaran yang

[70]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

jelas dan terukur, maka perencanaan akan sulit diimplementasikan dan tidak dapat dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, keberadaan sasaran yang terukur dalam Renstra PD merupakan syarat utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.



Gambar 3. 3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Setiap PD wajib merumuskan sasaran strategis yang dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Dengan adanya indikator, PD memiliki alat ukur yang obyektif untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan mereka berdampak pada masyarakat. Sehingga sasaran strategis pada Kecamatan Bekasi Barat yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat.
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.

Kedua sasaran strategis ini saling berkaitan dan saling mendukung, karena keberadaan LKM yang kuat dan berfungsi secara optimal akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sementara efektivitas pelayanan masyarakat yang meningkat akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata warga serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Barat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	85.02	85.56	86.12	86.69	87.27	87.86	88.47
		Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	N/A	70	72	74	77	80	83
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	0.64%	0.64%	0.65%	0.66%	0.67%	0.68%	0.69%

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.3 Strategi Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan salah satu elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, melainkan sebagai instrumen manajerial yang menjelaskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Salah satu aspek paling penting dalam Renstra PD adalah perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Dimana berfungsi sebagai pedoman operasional bagi PD dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan.

Strategi ini diperlukan karena tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra bersifat jangka menengah (lima tahun), sehingga membutuhkan langkah-langkah sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan agar dapat diwujudkan secara efektif. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra PD harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, serta akuntabilitas.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD biasanya dituangkan dalam bentuk rumusan yang sistematis. Proses implementasinya dimulai dari identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh OPD. Isu strategis dapat berupa permasalahan yang mendesak, tantangan jangka panjang, atau peluang pembangunan yang harus dimanfaatkan. Dari identifikasi isu strategis tersebut kemudian dirumuskan strategi yang sesuai untuk menjawab tantangan maupun memanfaatkan peluang.

Strategi Kecamatan Bekasi Barat dalam renstra 2025-2029 ini berdasarkan sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Bekasi Barat 2025-2029

Tujuan Jangka Menengah	Sasaran Strategis	Strategi
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Barat	1. Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat	• Pembinaan & fasilitasi kelembagaan LKM • Peningkatan kapasitas & profesionalisme pengurus LKM • Penguatan kolaborasi LKM dengan Kecamatan
	2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	• Digitalisasi layanan publik • Penyederhanaan prosedur & peningkatan standar pelayanan • Penguatan kapasitas aparatur pelayanan • Optimalisasi pengaduan masyarakat

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Kecamatan Bekasi Barat

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Pendataan LKM & pembentukan forum komunikasi	Pelatihan manajemen organisasi LKM	Fasilitasi kemitraan LKM dengan OPD/dunia usaha	Evaluasi & penguatan peran LKM dalam pelayanan publik	Minimal 85% LKM aktif & berperan dalam pelayanan
Review & penyusunan SOP pelayanan, baseline survei IKM	Digitalisasi layanan & uji coba aplikasi	Penerapan <i>service excellence</i> bagi aparatur	Optimalisasi sistem pengaduan & monitoring real time	IKM ≥ 85, rata-rata layanan ≤ 2 hari selesai

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

3.4 Arah Kebijakan Pada Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

Penyusunan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat merupakan suatu tahapan penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Sebagai bagian integral dari perangkat daerah, kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani kebijakan makro pemerintah kota dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat wilayah. Renstra Kecamatan Bekasi Barat tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang bersifat operasional dan aplikatif, sehingga setiap langkah pembangunan yang dilakukan memiliki landasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Bekasi Barat disusun dengan

memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi pada periode perencanaan jangka menengah. Tantangan tersebut antara lain adalah peningkatan jumlah penduduk, kompleksitas permasalahan perkotaan, keterbatasan sumber daya aparatur, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menuntut pemerintah daerah, termasuk kecamatan, untuk melakukan inovasi dan modernisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila tantangan-tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik melalui arah kebijakan yang tepat, maka tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Arah kebijakan pada sasaran strategis pertama diarahkan pada upaya penguatan kelembagaan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah kecamatan. Keberadaan LKM yang kuat, mandiri, dan profesional diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, arah kebijakan difokuskan pada pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia LKM, serta penguatan kolaborasi antara LKM dengan pemerintah kecamatan. Dengan arah kebijakan tersebut, LKM tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai mitra yang mampu mendukung pelayanan publik secara nyata.

Sementara itu, arah kebijakan pada sasaran strategis kedua difokuskan pada peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat. Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Untuk menjawab tuntutan tersebut, arah kebijakan diarahkan pada digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat. Dengan kebijakan yang terarah, pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat diharapkan mampu mencapai standar pelayanan prima yang ditandai dengan kepuasan masyarakat yang tinggi serta waktu pelayanan yang semakin efisien.

Sasaran strategis pertama dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat adalah “meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat.” LKM berfungsi

sebagai wadah partisipasi, penyalur aspirasi, sekaligus mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Keberadaan LKM yang aktif, kredibel, dan profesional menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam pembangunan wilayah.

Kecamatan Bekasi Barat memerlukan dukungan kelembagaan masyarakat yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Oleh karena itu, peningkatan peran LKM dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Untuk mencapai sasaran strategis ini, arah kebijakan disusun dengan menitik beratkan pada tiga aspek utama: pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kolaborasi.

1. Pembinaan kelembagaan diarahkan pada penataan organisasi, penyusunan regulasi internal, serta penguatan tata kelola administrasi LKM agar lebih tertib dan akuntabel.
2. Peningkatan kapasitas difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia pengurus LKM, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi akses informasi.
3. Penguatan kolaborasi menekankan pentingnya kemitraan antara LKM, pemerintah kecamatan, dunia usaha, dan lembaga lain, sehingga LKM dapat berfungsi sebagai mitra pembangunan yang strategis.

Sasaran strategis kedua yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat adalah “meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.” Sasaran ini menjadi sangat penting mengingat pelayanan publik merupakan wajah nyata pemerintahan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Tingginya jumlah penduduk, heterogenitas masyarakat, serta tingginya mobilitas warga menuntut aparatur kecamatan untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif dan responsif. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan pelayanan masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat diarahkan pada empat aspek kunci:

1. Digitalisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.



Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

2. Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Standar Pelayanan Publik.

Reformasi birokrasi pada level kecamatan dilakukan melalui perampingan alur layanan, penyusunan SOP yang jelas, serta penerapan standar waktu layanan.

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan.

Aparatur sebagai garda terdepan pelayanan publik harus dibekali dengan kompetensi teknis, administratif, maupun kompetensi etika pelayanan yang sesuai dengan prinsip service excellence.

4. Optimalisasi Mekanisme Pengaduan Masyarakat.

Sistem pengaduan yang responsif dan transparan diperlukan sebagai sarana kontrol sosial dan peningkatan kualitas layanan.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bekasi Barat

Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai	Penciptaan Lingkungan Perkotaan yang Asri, Nyaman dan Berestetika	• Menyediakan dukungan teknis, administrasi, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan LKM. • Mendorong LKM menyusun AD/ART serta regulasi internal sesuai peraturan perundang-undangan. • Mengoptimalkan pembaharuan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala agar lebih optimal • Memfasilitasi LKM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan organisasi
Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Publik di Semua Sektor yang Ditangani	• Meningkatkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasis digital guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat • Mendorong budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat



		• Meningkatkan layanan informasi publik melalui website resmi dan media sosial kecamatan • Menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan terukur • Memberikan bimbingan teknis terkait regulasi dan kebijakan pelayanan terbaru
--	--	---

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu instrumen strategis yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta dapat diukur keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai dokumen perencanaan strategis, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat memiliki peran penting dalam menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Bab ini menjadi bagian yang sangat penting karena memuat secara rinci mengenai program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Barat selama periode perencanaan, beserta kinerja penyelenggaraan urusan yang menjadi mandat kewenangan kecamatan.

Dalam penyusunannya, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat mengacu pada prinsip-prinsip dasar perencanaan pembangunan daerah. Pertama, prinsip keselarasan dan konsistensi, yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan di tingkat kecamatan harus selaras dengan kebijakan pembangunan kota, provinsi, hingga nasional. Kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi, yang menghendaki agar program dan kegiatan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dilaksanakan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ketiga, prinsip partisipatif dan responsif, yang menghendaki agar program dan kegiatan dapat merespons kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. Keempat, prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian hasil.

Lebih lanjut, kedudukan program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Barat juga harus dipahami dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

[79]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh wali kota. Dalam konteks inilah, Kecamatan Bekasi Barat memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan publik, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta penataan wilayah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Bab ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang dimandatkan kepada kecamatan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kerangka program Kecamatan Bekasi Barat disusun berdasarkan prinsip bahwa setiap program pembangunan harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan jangka menengah serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil dari proses cascading atau penjabaran yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output organisasi perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan logis antara visi dan misi Kepala Daerah dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana.

Penjabaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap program tidak hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi mengandung nilai strategis yang mendukung capaian sasaran kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

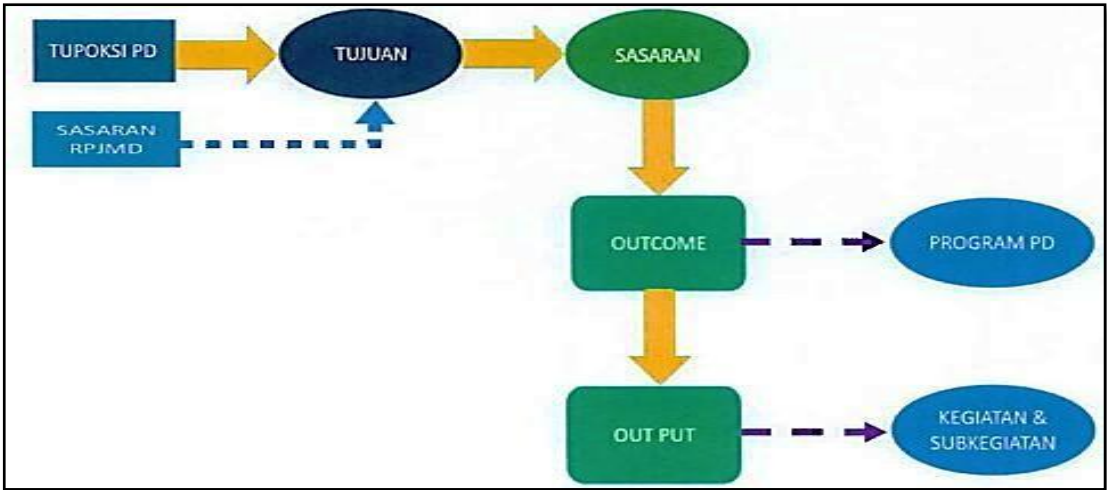
Rencana strategis juga disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, baik dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi), maupun antar-perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergi antarkebijakan demi pencapaian pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara konsisten. Tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari kesinambungan strategi pembangunan, sehingga penting ditegaskan bahwa program pada tahun tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan menjaga

[80]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



arah kebijakan tetap selaras dengan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan SubKegiatan Pada Kecamatan Bekasi Barat

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4. 1 Cascading Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Barat				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
		Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat			Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik		
			Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat		Persentase LKM yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kranji)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Kotabaru)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bintarajaya)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bintara)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Jakasampurna)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kranji)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel.Kotabaru)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bintarajaya)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bintara)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Jakasampurna)	
						Evaluasi Kelurahan	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintarajaya	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintara	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasampurna	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna	
				Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP	Pelaksanaan Ursan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Wilayah Tertib	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintara	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintarajaya	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranji	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kotabaru	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jakasampurna	
			Meningkatnya Penanganan Potensi		Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Konflik di wilayah Kecamatan				
				Terlaksananya Sunergitas Pimpinan di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Terlaksananya Sunergitas Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4. 2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
UNSUR KEWILAYAHAN		82.5	48,028,207,480	82.5	48,774,148,840	82.5	51,308,083,050	82.75	54,199,694,234	82.75	57,057,752,178	83	59,457,947,901	
KECAMATAN BEKASI BARAT			26,328,979,680		24,922,282,440		26,291,216,650		27,872,827,834		29,345,885,778		30,361,081,501	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	25,428,581,680	100%	23,982,549,440	100%	25,232,278,801	100%	26,693,923,660	100%	28,067,999,751	100%	28,914,344,744	
			25,428,581,680		-				-					
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	8,530,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,530,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	4 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8,530,000	4 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.22%	15,559,606,000	95.22%	20,354,793,000	95.22%	21,604,522,361	95.22%	23,066,167,220	95.22%	24,440,243,311	95.22%	25,286,588,304	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	15,559,606,000	100%	20,354,793,000	100%	21,604,522,361	100%	23,066,167,220	100%	24,440,243,311	100%	25,286,588,304	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5152 Orang/ bulan	15,550,956,000	5124 Orang/ bulan	20,349,793,000	5124 Orang/ bulan	21,599,522,361	5124 Orang/ bulan	23,056,167,220	5124 Orang/ bulan	24,430,243,311	5124 Orang/ bulan	25,276,588,304	Kecamatan Bekasi Barat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,650,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83.70%	6,375,000	83.70%	20,000,000	83.70%	20,000,000	83.70%	20,000,000	83.70%	20,000,000	83.70%	20,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6,375,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	-	0 paket	-	210 Paket	-	210 Paket	-	210 Paket	-	210 Paket	-	Kecamatan Bekasi Barat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	6,375,000	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	Kecamatan Bekasi Barat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150 Orang	-	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	210 Orang	20,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	9,854,070,680	100%	3,592,756,440	100%	3,592,756,440	100%	3,592,756,440	100%	3,592,756,440	100%	3,592,756,440	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	485,540,000	100%	485,500,000	100%	485,500,000	100%	485,500,000	100%	485,500,000	100%	485,500,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	240,000,000	3 Paket	240,000,000	3 Paket	240,000,000	3 Paket	240,000,000	3 Paket	240,000,000	3 Paket	240,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	Kecamatan Bekasi Barat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105,540,000	12 Laporan	105,500,000	12 Laporan	105,500,000	12 Laporan	105,500,000	12 Laporan	105,500,000	12 Laporan	105,500,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	54,845,000	100%	308,606,780	100%	308,606,780	100%	308,606,780	100%	308,606,780	100%	308,606,780	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	-	26 Unit	30,000,000	26 Unit	30,000,000	26 Unit	30,000,000	26 Unit	30,000,000	26 Unit	30,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	54,845,000	29 Unit	278,606,780	30 Unit	278,606,780	30 Unit	278,606,780	30 Unit	278,606,780	30 Unit	278,606,780	Kecamatan Bekasi Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,534,891,680	100%	2,121,703,660	100%	2,121,703,660	100%	2,121,703,660	100%	2,121,703,660	100%	2,121,703,660	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	404,600,000	12 Laporan	490,000,000	12 Laporan	490,000,000	12 Laporan	490,000,000	12 Laporan	490,000,000	12 Laporan	490,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,130,291,680	12 Laporan	1,631,703,660	12 Laporan	1,631,703,660	12 Laporan	1,631,703,660	12 Laporan	1,631,703,660	12 Laporan	1,631,703,660	Kecamatan Bekasi Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	778,794,000	100%	676,946,000	100%	676,946,000	100%	676,946,000	100%	676,946,000	100%	676,946,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98,200,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	35 Unit	167,800,000	31 Unit	140,000,000	31 Unit	140,000,000	31 Unit	140,000,000	31 Unit	140,000,000	31 Unit	140,000,000	Kecamatan Bekasi Barat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	112,794,000	105 Unit	86,946,000	105 Unit	86,946,000	105 Unit	86,946,000	105 Unit	86,946,000	105 Unit	86,946,000	Kecamatan Bekasi Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	400,000,000	6 Unit	400,000,000	6 Unit	400,000,000	6 Unit	400,000,000	6 Unit	400,000,000	6 Unit	400,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	192,735,000	100%	120,000,000	100%	126,576,000	100%	130,962,778	100%	134,188,072	100%	154,244,552	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	41,075,000	100%	40,000,000	100%	46,576,000	100%	50,962,778	100%	54,188,072	100%	54,244,552	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	41,075,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	46,576,000	12 Dokumen	50,962,778	12 Dokumen	54,188,072	12 Dokumen	54,244,552	Kecamatan Bekasi Barat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP	100%	151,660,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	
Pelaksanaan Ursan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	151,660,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Bekasi Barat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	-	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	100,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKM yang aktif	100%	301,176,000	100%	350,000,000	100%	417,067,780	100%	483,425,588	100%	540,605,338	100%	656,923,023	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	301,176,000	100%	330,000,000	100%	377,067,780	100%	423,425,588	100%	460,605,338	100%	556,923,023	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120,000,000	120,000,000	5 Lembaga K emasyarakat an	137,500,000	5 Lembaga K emasyarakat an	150,000,000	5 Lembaga K emasyarakat an	170,000,000	5 Lembaga K emasyarakat an	190,000,000	5 Lembaga K emasyarakat an	230,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	158,676,000	2 Pokmas / Ormas	142,500,000	2 Pokmas / Ormas	162,067,780	2 Pokmas / Ormas	178,425,588	2 Pokmas / Ormas	185,605,338	2 Pokmas / Ormas	226,923,023	Kecamatan Bekasi Barat
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	22,500,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	65,000,000	5 Laporan	75,000,000	5 Laporan	85,000,000	5 Laporan	100,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	-	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	60,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	-	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	368,175,000	100%	449,733,000	100%	494,258,069	100%	542,268,134	100%	579,705,863	100%	610,928,897	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	368,175,000	100%	449,733,000	100%	494,258,069	100%	542,268,134	100%	579,705,863	100%	610,928,897	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50,250,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	70,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	120,000,000	Kecamatan Bekasi Barat
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	317,925,000	12 Laporan	399,733,000	12 Laporan	424,258,069	12 Laporan	452,268,134	12 Laporan	479,705,863	12 Laporan	490,928,897	Kecamatan Bekasi Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	38,312,000	100%	20,000,000	100%	21,036,000	100%	22,247,674	100%	23,386,754	100%	24,640,285	
					-		-		-		-		-	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Sinergitas Pimpinan di Kecamatan	100%	38,312,000	100%	20,000,000	100%	21,036,000	100%	22,247,674	100%	23,386,754	100%	24,640,285	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	38,312,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	21,036,000	12 Dokumen	22,247,674	12 Dokumen	23,386,754	12 Dokumen	24,640,285	Kecamatan Bekasi Barat
			4,234,846,800		4,762,131,800		4,971,131,800		5,233,131,800		5,546,131,800		5,809,131,800	
			4,234,846,800		4,762,131,800		4,971,131,800		5,233,131,800		5,546,131,800		5,809,131,800	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	48,000,000	12 Dokumen	48,000,000	Kelurahan Bintara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	3,980,846,800	100%	4,488,131,800	100%	4,688,131,800	100%	4,938,131,800	100%	5,238,131,800	100%	5,488,131,800	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	3,940,846,800	100%	4,448,131,800	100%	4,648,131,800	100%	4,898,131,800	100%	5,198,131,800	100%	5,448,131,800	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Kelurahan Bintara
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508 Pokmas / Ormas	3,740,846,800	221 Pokmas / Ormas	4,248,131,800	221 Pokmas / Ormas	4,448,131,800	221 Pokmas / Ormas	4,698,131,800	221 Pokmas / Ormas	4,998,131,800	221 Pokmas / Ormas	5,248,131,800	Kelurahan Bintara

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kelurahan Bintara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	234,000,000	100%	234,000,000	100%	241,000,000	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	273,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	234,000,000	100%	234,000,000	100%	241,000,000	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	273,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	234,000,000	12 Laporan	234,000,000	12 Laporan	241,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	260,000,000	12 Laporan	273,000,000	Kelurahan Bintara
			3,555,761,000		3,876,788,000		4,125,788,000		4,437,788,000		4,700,788,000		4,973,788,000	
			3,555,761,000		3,876,788,000		4,125,788,000		4,437,788,000		4,700,788,000		4,973,788,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	42,000,000	12 Laporan	45,000,000	12 Laporan	48,000,000	12 Laporan	48,000,000	Kelurahan Bintarajaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	3,345,761,000	100%	3,666,788,000	100%	3,906,788,000	100%	4,206,788,000	100%	4,456,788,000	100%	4,716,788,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	3,305,761,000	100%	3,626,788,000	100%	3,866,788,000	100%	4,166,788,000	100%	4,416,788,000	100%	4,676,788,000	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Kelurahan Bintarajaya
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494 Pokmas / Ormas	3,105,761,000	169 Pokmas / Ormas	3,426,788,000	169 Pokmas / Ormas	3,666,788,000	169 Pokmas / Ormas	3,966,788,000	169 Pokmas / Ormas	4,216,788,000	169 Pokmas / Ormas	4,476,788,000	Kelurahan Bintarajaya
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kelurahan Bintarajaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	177,000,000	100%	186,000,000	100%	196,000,000	100%	209,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	177,000,000	100%	186,000,000	100%	196,000,000	100%	209,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	170,000,000	12 Laporan	170,000,000	12 Laporan	177,000,000	12 Laporan	186,000,000	12 Laporan	196,000,000	12 Laporan	209,000,000	Kelurahan Bintarajaya
			3,591,832,000		3,910,926,000		4,139,926,000		4,441,926,000		4,704,926,000		4,987,926,000	
			3,591,832,000		3,910,926,000		4,139,926,000		4,441,926,000		4,704,926,000		4,987,926,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	45,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	45,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	48,000,000	12 Dokumen	48,000,000	Kelurahan Kranji

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Prasarana Pelayanan Umum													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	3,396,832,000	100%	3,706,926,000	100%	3,926,926,000	100%	4,216,926,000	100%	4,466,926,000	100%	4,736,926,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	3,356,832,000	100%	3,666,926,000	100%	3,886,926,000	100%	4,176,926,000	100%	4,426,926,000	100%	4,696,926,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Kelurahan Kranji
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	3,156,832,000	151 Pokmas / Ormas	3,466,926,000	151 Pokmas / Ormas	3,686,926,000	151 Pokmas / Ormas	3,976,926,000	151 Pokmas / Ormas	4,226,926,000	151 Pokmas / Ormas	4,496,926,000	Kelurahan Kranji
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kelurahan Kranji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	150,000,000	100%	164,000,000	100%	171,000,000	100%	180,000,000	100%	190,000,000	100%	203,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	150,000,000	100%	164,000,000	100%	171,000,000	100%	180,000,000	100%	190,000,000	100%	203,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	150,000,000	12Laporan	164,000,000	12Laporan	171,000,000	12Laporan	180,000,000	12Laporan	190,000,000	12Laporan	203,000,000	Kelurahan Kranji
			4,937,084,400		5,418,008,400		5,667,008,400		5,839,008,400		6,102,008,400		6,405,008,400	
			4,937,084,400		5,418,008,400		5,667,008,400		5,839,008,400		6,102,008,400		6,405,008,400	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	48,000,000	12 Dokumen	48,000,000	Kelurahan Kotabaru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	4,703,584,400	100%	5,184,508,400	100%	5,424,508,400	100%	5,584,508,400	100%	5,834,508,400	100%	6,124,508,400	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	4,663,584,400	100%	5,144,508,400	100%	5,384,508,400	100%	5,544,508,400	100%	5,794,508,400	100%	6,084,508,400	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Kelurahan Kotabaru
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	4,463,584,400	240 Pokmas / Ormas	4,944,508,400	240 Pokmas / Ormas	5,184,508,400	240 Pokmas / Ormas	5,344,508,400	240 Pokmas / Ormas	5,594,508,400	240 Pokmas / Ormas	5,884,508,400	Kelurahan Kotabaru
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pemberdayaan Kelurahan	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kelurahan Kotabaru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	193,500,000	100%	193,500,000	100%	200,500,000	100%	209,500,000	100%	219,500,000	100%	232,500,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	193,500,000	100%	193,500,000	100%	200,500,000	100%	209,500,000	100%	219,500,000	100%	232,500,000	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	193,500,000	12 Laporan	193,500,000	12 Laporan	200,500,000	12 Laporan	209,500,000	12 Laporan	219,500,000	12 Laporan	232,500,000	Kelurahan Kotabaru
			5,379,703,600		5,884,012,200		6,113,012,200		6,375,012,200		6,658,012,200		6,921,012,200	
			5,379,703,600		5,884,012,200		6,113,012,200		6,375,012,200		6,658,012,200		6,921,012,200	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	50,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	50,000,000	100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	45,000,000	100%	48,000,000	100%	48,000,000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	48,000,000	12 Dokumen	48,000,000	Kelurahan Jakasampurna
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	5,005,703,600	100%	5,520,012,200	100%	5,740,012,200	100%	5,990,012,200	100%	6,260,012,200	100%	6,510,012,200	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapaiannya Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat	100%	4,965,703,600	100%	5,480,012,200	100%	5,700,012,200	100%	5,950,012,200	100%	6,220,012,200	100%	6,470,012,200	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Kelurahan Jakasampurna
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	4,765,703,600	259 Pokmas / Ormas	5,280,012,200	259 Pokmas / Ormas	5,500,012,200	259 Pokmas / Ormas	5,750,012,200	259 Pokmas / Ormas	6,020,012,200	259 Pokmas / Ormas	6,270,012,200	Kelurahan Jakasampurna
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapaiannya Pemberdayaan Kelurahan	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kelurahan Jakasampurna
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	324,000,000	100%	324,000,000	100%	331,000,000	100%	340,000,000	100%	350,000,000	100%	363,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Barat	100%	324,000,000	100%	324,000,000	100%	331,000,000	100%	340,000,000	100%	350,000,000	100%	363,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	324,000,000	12Laporan	324,000,000	12Laporan	331,000,000	12Laporan	340,000,000	12Laporan	350,000,000	12Laporan	363,000,000	Kelurahan Jakasampurna

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Kecamatan Bekasi Barat dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Kecamatan Bekasi Barat dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat dan Gerakan Kobe Hijau
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kranji)	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Kotabaru)	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bintarajaya)	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bintara)	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Jakasampurna)	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kranji)	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel.Kotabaru)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bintarajaya)	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bintara)	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Jakasampuna)	
		Evaluasi Kelurahan	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintarajaya	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintara	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasampurna	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gerakan Kobe Berkinerja
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Bekasi Barat memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang mendukung Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kedua Program tersebut termasuk ke dalam 7 (tujuh) program unggulan Kota Bekasi atau yang dikenal dengan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



“Sapta Program Kota Bekasi Keren”. program unggulan ini merupakan percepatan Pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin Sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi Kota Bekasi yang telah ditetapkan. Ke-7 (tujuh) program unggulan Kota Bekasi Keren tersebut adalah :

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Untuk Program Kecamatan Bekasi Barat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mendukung Program Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat dan Gerakan Kobe Hijau dengan outcomenya Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mendukung Gerakan Kobe Berkinerja dengan outcomenya Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

[108]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Kedua program tersebut fokus utamanya berupa pemberian insentif bagi para kader Posyandu, Tim PKK dan para penggeraknya, pemberian apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah, bantuan operasional dan sarpras praja bhakti per tahun Rp 100 juta/RW, pembangunan sarana dan prasarana olahraga di kecamatan, bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat melalui LPM/BKM secara bertahap, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan pada infrastruktur dan sarana prasana untuk masyarakat dengan pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik terbuka diseluruh kelurahan dan kecamatan.

4.2.1 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kacamata/level kota maupun keluarga.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu,

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

4. Strategi peningkatan tata Kelola

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

4.2.2 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

[110]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



terkonvergen, Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah agar melakukan :

- Memastikan Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari :
 - ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - anak usia 0-23 bulan;
 - anak usia 24-59 bulan;
 - remaja putri;
 - calon pengantin;
 - keluarga dan masyarakat.
- Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing indikator layanan sebagai berikut:

INDIKATOR LAYANAN	
IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI	
1.	Pemberian Makan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;
2.	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;
3.	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4.	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
5.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
ANAK USIA 0 - 23 BULAN	
1.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini;
2.	Bayi Usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
3.	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam;
4.	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;
5.	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6.	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7.	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan supan gizi;
8.	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin lengkap;
9.	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
10.	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM).
INDIKATOR LAYANAN	
ANAK USIA 24 - 59 BULAN	
1.	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
2.	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
3.	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
4.	Anak usia 24-59 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
5.	Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
6.	Anak usia 24-59 bulan mendapat obat cacing (POPM).
REMAJA PUTRI	
1.	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
2.	Skrining anemia terhadap Remaja Putri

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



CALON PENGANTIN
1. Calon pengantin mendapat pemeriksaan kesehatan; 2. Calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
RUMAH TANGGA MASYARAKAT
1. Akses terhadap Air Minum Aman; 2. Akses terhadap Sanitasi Aman; 3. Kepemilikan JKN; 4. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan; 5. Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); 6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Barat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat

IKU	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	N/A	Persen	70%	72%	74%	77%	80%	83%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	0.64%	Persen	0.64%	0.65%	0.66%	0.67%	0.68%	0.69%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



(IKK) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKK Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bekasi Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kewilayahan (Kecamatan)									
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	100	100	100	100	

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Bekasi Barat adalah (1) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan; (2) Persentase LKM yang Aktif; (3) Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat; dan (4) Persentase Wilayah Tertib. Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek kewilayahan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi Barat.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029. Selain dijadikan pedoman, Renstra Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi.

Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja lingkup Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Demikian rumusan Rencana

[114]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN 2025-2029

Strategis Kecamatan Bekasi Barat ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Barat.

Bekasi, 2025

CAMAT BEKASI BARAT

RIDWAN AS, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691030 200312 1 005

[115]

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Barat	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	